

ANALISA YURIDIS PENGATURAN JAMINAN SOSIAL DI INDONESIA

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum

Evy Flamboyan Minanda

NPM 0806425273



**PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA
JAKARTA
JULI 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Evy Flamboyan Minanda

NPM : 0806425273

Tanda tangan :

Tanggal : 23 Juli 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Evy Flamboyan Minanda
NPM : 0806425273
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : **ANALISA YURIDIS PENGATURAN JAMINAN
SOSIAL DI INDONESIA**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : **Prof. Dr. Satya Arinanto, SH., MH**

Penguji : **Dr. Widodo Suryondono, SH., MH**

Penguji : **Dr. Siti Hajati Hoesin, SH., MH., CN**

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 23 Juli 2010

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini, dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum Kekhususan Hukum Kenegaraan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, diantaranya:

1. Prof. Dr. Satya Arinanto, SH, MH, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
2. Prof. Dr. Benyamin Hoessein, SH, Prof. Dr. Harun Alrasid, SH, Prof. Dr. Arifin P. Soeriaatmadja, SH, Prof. Dr. Maria Farida Indrati S, SH, MH, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, Prof. Dr. Abdul Bari Azed, SH, MH, Prof. Dr. Ramli Hutabarat, SH, MH, Prof. Dr. Valerine J.L.K., SH, Prof. Safri Nugraha, SH, LL.M, Ph.D, Dr. Jufrina Rizal, SH, MA, Dr. Supandi, SH, MH, Dr. Wukir Ragil, SH, MPD, Sri Mamudji, SH, MLL, selaku dosen Program Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang selama ini telah mengasuh, memberikan, dan membagikan pengetahuannya kepada saya;
3. Kedua orang tua penulis, Bapak dan Mama, serta saudara-saudaraku tercinta Erni, Iskandar, Irvan, dan Desy atas dukungan dan pengertiannya;
4. Bhakti Nusantoro, SH, Dian Nur Astuti, SH.,MH, Yugi Budi Soemarno, SH, dan Akhiril Hadi, SH selaku pimpinan yang telah memberikan kepercayaan, kesempatan, dan kemudahan penulis untuk mengikuti program tugas belajar dari Kementerian Sosial Republik Indonesia;
6. Seluruh staf akademik Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, rekan-rekan kuliah (Abdi, Agung, Anggi, Fauzan, Laura, Rian, Veni, Teteh, Qiqi, dan Trypu), rekan-rekan kerja, serta semua pihak yang telah membantu dan tidak tersebut satu persatu dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, saya berharap Allah berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Tak ada gading yang tak retak dan semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu. Amin.

Jakarta, Juli 2010
Evy Flamboyan Minanda

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Evy Flamboyan Minanda
NPM : 0806425273
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis karya : **Tesis**

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

ANALISA YURIDIS PENGATURAN JAMINAN SOSIAL DI INDONESIA

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal: 23 Juli 2010
Yang menyatakan

Evy Flamboyan Minanda

ABSTRAK

Nama : Evy Flamboyan Minanda
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul : **Analisa Yuridis Pengaturan Jaminan Sosial di Indonesia**

Indonesia merupakan penganut negara kesejahteraan dengan karakteristik tersendiri yakni berdasarkan prinsip sila ke-lima Pancasila ‘keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’. Salah satu ciri dari Negara kesejahteraan adalah Negara bertanggung jawab menyelenggarakan jaminan sosial. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan terhadap identifikasi permasalahan terkait topik penelitian ini, yaitu: *pertama*, ketika kita berbicara mengenai konsep jaring pengaman sosial berarti kita berbicara mengenai konsep bantuan sosial untuk penduduk miskin, lanjut usia, anak terlantar, dan penyandang masalah sosial lainnya yang harusnya diberikan sebuah program berupa bantuan sosial. Bantuan sosial itu dapat bermacam-macam bentuknya, bisa berupa pemberian uang tunai untuk masa-masa tertentu, bantuan pemenuhan kesehatan, atau bantuan pemberdayaan masyarakat miskin. Namun, dalam prakteknya terdapat kerancuan program antara bantuan sosial dan asuransi sosial. *Kedua*, sistem jaminan sosial ini tidak diterapkan menurut penulis lebih karena kekhawatiran yang berlebihan hilangnya ‘tambang emas’ yang saat ini menjadi program andalan sebuah kementerian. Misalnya saja, Kementerian Tenaga Kerja akan sangat berat hati melepas program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Kementerian Kesehatan akan berat hati melepas program Jaminan Kesehatan Rakyat Miskin. *Ketiga*, terkait terhambatnya pembentukan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, kemudian Presiden mengeluarkan program penanggulangan kemiskinan dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan seakan-akan peraturan ini merupakan salah satu peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Padahal, pembentukan Peraturan Presiden tersebut merupakan usaha untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Dengan disahkannya Undang-Undang tentang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, sebenarnya mengindikasikan pembagian kewenangan tentang jaminan sosial, dimana jaminan sosial yang berbasis asuransi merupakan kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sedangkan jaminan sosial yang berbasis bantuan sosial adalah kewenangan Kementerian Sosial. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

ABSTRACT

Nama : Evy Flamboyan Minanda
Program Studi : Magister of Law
Judul : **Juridical Analisis Regulation of Social Security in Indonesia**

Indonesia is a welfare state with its own characteristics based on the fifth principles of Pancasila, 'social justice for all Indonesian people'. One of the characteristics of welfare state is the responsibility for social security. Based on the analysis done on the identification of problems related to these research topics, is: *First*, when we talk about the concept of social guarantee network means we are talking about the concept of social assistance to the poor, elderly, waif, and other social problems that should be a formula of social assistance programs. The social assistance could be a variety of forms, it can be a gift of cash to a certain times, assistance health care, or empowering the poor community. However, in the practice the obscure of the program is in the social assistance and social insurance. *Second*, the social security system is not applied; more because of interest to over loss of 'gold mining' that is now a main program of the ministry. For example, the Ministry of Labor will be very heavy released its Labor Social Security program and the Ministry of Health will reluctantly release the Poor People's health assurance program. *Third*, the obstacles of forming the regulation that implementing the Law Number 40 Year 2004 about The National Social Security System relating to the Social Security system, and then President issuing Presidential Regulation Number 15 Year 2010 about Velocity Tackling Poverty on handling poverty and act as if the regulation is one of the implementation of Law Number 40 Year 2004. In fact, the formation of such Presidential Regulation is to accelerate efforts of handling poverty. Law Number 40 Year 2004 and Law Number 11 Year 2009 about Social Prosperity, actually indicates the distribution of authority on social protection, the social protection which is based on insurance is the authority of Social Security Institution while social protection based on social assistance is the authority of Ministry of Social. The Research method is juridical-normative method, legal research done by reviewing library materials or secondary data.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pernyataan Orisinalitas	ii
Halaman Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi	v
Abstrak	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	xii
Bab I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Permasalahan	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Metode Penelitian	10
F. Kerangka Teori	13
1. Negara Kesejahteraan	13
2. Prinsip Keadilan	17
3. Kewenangan	20
4. Hak Asasi Manusia	21
G. Kerangka Konsep	29
H. Sistematika Penulisan	32
BAB II TINJAUAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	34
A. Definisi Kesejahteraan	34
B. Peran Negara dalam Kesejahteraan Sosial	36
1. Peran Negara dalam Kesejahteraan Sosial	36

2.	Peran Negara dalam Kesejahteraan Sosial Menurut Islam	39
3.	Peran Negara dalam Kesejahteraan Sosial di Indonesia	41
C.	Jaminan Sosial Menurut Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945.....	55
D.	Tinjauan Umum Jaminan Sosial di Beberapa Negara	61
1.	Scandinavia	67
2.	Jerman	67
3.	Kolombia	69
4.	Chili	70
BAB III JAMINAN SOSIAL DI INDONESIA		72
A.	Pengaturan Jaminan Sosial Tahun 1969 - 2010	72
1.	Konstitusi Negara Republik Indonesia	74
2.	Undang-Undang Organik	82
a.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai	82
b.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial	83
c.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja	86
d.	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional	89
e.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan <i>International Covenant on Civil and Politic Right</i> (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)	96
f.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial	96
g.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	99
3.	Peraturan Pelaksana	101

a.	Peraturan Pemerintah	101
b.	Keputusan / Peraturan Presiden	104
B.	Program Bantuan Sosial untuk Menanggulangi Kemiskinan	112
1.	Program Bantuan Sosial Berdasarkan Peraturan Presiden	
	Nomor 13 Tahun 2009	121
a.	Program Keluarga Harapan	122
b.	Bantuan Langsung Tunai	128
c.	Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin)	130
d.	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	131
e.	Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)	132
2.	Program Bantuan Sosial Berdasarkan Peraturan Presiden	
	Nomor 15 Tahun 2010	141
a.	Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga (<i>Family Centered Integrated Social Assistance</i>)	141
b.	Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	145
c.	Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil	145
C.	Program Jaminan Sosial di Kementerian Sosial.....	147
1.	Asuransi Kesejahteraan Sosial	150
2.	Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen	154

BAB IV	ANALISA YURIDIS PENGATURAN JAMINAN SOSIAL	157
A.	Analisa Kewenangan Kementerian Sosial dalam Menyelenggarakan Jaminan Sosial	157
B.	Analisa Hak Asasi Manusia terhadap Pemenuhan Jaminan Sosial	176
C.	Kelemahan Yuridis Pengaturan Jaminan Sosial	182
1.	Bahasa Peraturan	182
2.	Kepastian Hukum	185
3.	Validitas Norma	189

4. Pendelegasian Kewenangan Pembentukan Peraturan Pelaksana	192
BAB V PENUTUP	198
A. Kesimpulan	198
B. Saran	201
DAFTAR PUSTAKA	203
A. Buku	203
B. Majalah Ilmiah / Jurnal	206
C. Artikel di Surat Kabar	206
D. Bahan Kuliah dan Hasil Penelitian	207
E. Artikel di Internet	207
F. West Law	209
G. Kamus	209
H. Putusan	210
I. Peraturan Dasar dan Peraturan Perundang-undangan	210

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	
Model-model Jaminan Kesehatan di dunia	65
Tabel 3.1	
Beasiswa bagi Kelompok Masyarakat Miskin yang Diberikan oleh Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2009	142

